

**NOTA KESEPAHAMAN**

**(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

**DENGAN**

**PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI WILAYAH**

**KABUPATEN MADIUN**

**Nomor : 019/PM.04/K.JI-12/06/22**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Madiun, Jalan Raya Ponorogo No. 63171. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nur Anwar, SH.I**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Madiun, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 0636/K.BAWASLU/HK.01101/VIII/2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Madiun, berkedudukan di Jalan Raya Ponorogo No. 63171, selanjutnya disebut pihak **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Budi Utomo**, selaku Pimpinan Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), yang berkedudukan di Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**,

**PARA PIHAK** dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dengan iktikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Madiun dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini tandatangani dengan tujuan untuk Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Wilayah Kabupaten Madiun
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam bidang :

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.
- b. Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif.

**BAB III**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 3**

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

**BAB VII**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 7**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Madiun  
Ketua,



Mur Anwar, SH.I

PIHAK KEDUA

Persatuan Tunanetra Indonesia  
(PERTUNI)  
Pimpinan,



Budi Utomo